

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Salah satu wujud negara demokrasi adalah adanya kesamaan hak politik dalam partisipasi pemilihan umum. Salah satu elemen penting dalam demokrasi adanya partai politik karena merupakan bagian dari demokrasi. Partai politik juga sangat berperan dalam menentukan wakil rakyat baik Eksekutif maupun Legislatif, sebagai wadah penyeleksian melalui partai politik yang sebagaimana telah di atur dalam undang-undang.

Dalam sebuah demokrasi terdapat dua bagian terpenting yaitu kompetisi dan partisipasi. Di negara Indonesia Pesta Demokrasi diselenggarakan dalam kurun waktu lima tahun sekali dan para calon bebas bersaing untuk merebut suara, sebuah pesta demokrasi yang sangat dinantikan sebagai tolak ukur keberhasilan apa yang disebut demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan paham demokrasi, partai politik suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan. Setiap partai politik akan selalu berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat yang besar saat pemilihan umum agar didominasi oleh partai politik yang bersangkutan.

Adanya pemilihan umum maka salah satu nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadi perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai (Henry B. Mayo. 1986:61). Berdasarkan Undang-undang no 8 tahun 2012, Pemilihan Umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum sendiri yang di ikuti oleh partai politik yang telah sah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum mempunyai strategi – strategi tersendiri dalam memikat hati masyarakat untuk menarik simpati, lebih dari itu melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya dalam menyatakan pendapat dan menentukan tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum pada prinsipnya yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sekali, yakni utamanya untuk memilih wakil – wakil rakyat yang akan duduk di parlemen dan menentukan kepala negara (presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden), yang mana dalam kedua hal tersebut sangat sangat dipengaruhi oleh komposisi perolehan suara dari partai politik peserta pemilu. Partai politik yang memperoleh kursi mayoritas dalam pemilu maka akan memperoleh kesempatan pertama untuk menentukan komposisi Pemerintahan Negara khususnya legislatif. Sedangkan jika dalam pemilu tidak ada satupun partai politik yang mampu menduduki kursi mayoritas, maka penentuan komposisi pemerintahan

negara dilakukan dengan cara koalisi, yakni bergabungnya dua partai politik atau lebih untuk memperkuat suara di parlemen.

Dari uraian diatas, secara sederhana negara demokrasi salah satunya ditandai dengan adanya pemilihan umum dan partai politik sebagai wadah dengan masyarakat sebagai penentu dalam kemenangan partai politik. Dalam hal ini sebuah komunikasi sangat diperlukan dalam partai politik, baik dalam mencari koalisi apabila tidak mendominasi suara kursi di parlemen atau guna untuk merebut kekuasaan bahkan mempertahankan kekuasaan sebagai kepala negara dan wakil kepala negara dengan cara menjual partai politik ataupun calon – calon untuk memperoleh dukungan suara dari masyarakat, tentu untuk mendapatkan sebuah dukungan dari masyarakat setiap partai politik mempunyai cara tersendiri atau strategi politik masing-masing partai politik.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa momentum pesta demokrasi di Indonesia pada tahun 2019 ini merupakan momentum pesta rakyat dalam menentukan pilihan baik di Legislatif maupun Eksekutif. Cara – cara atau upaya yang dilakukan partai politik sangat lah beragam dalam hal meraih suara dalam pemilihan umum baik di tingkat Kabupaten/Kota, hingga DPR RI dalam hal ini Legislatif, maupun Eksekutif yang akan menduduki kepala negara (presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden).

Di Indonesia sendiri pada pemilihan umum 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 16 partai politik sebagai peserta Pemilihan

Umum 2019. Adapun partai politik yang lolos jadi peserta Pemilu 2019 adalah: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai PKP. (Partai peserta pemilu, 2019).

Di ajang pesta Demokrasi pemilu 2019 ini lebih menarik dibanding pada saat pemilu 2014, hal ini dikarenakan adanya partai politik pendatang baru yang memeriahkan ajang pesta demokrasi lima tahun sekali. Adapun partai politik baru yang ikut berkontestasi dalam pesta demokrasi yaitu Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). hadir dengan ideologi serta citra partainya masing-masing yang kian membuat semarak pesta demokrasi di Indonesia kian menarik.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam BAB II dalam PKPU Nomor Tahun 2018 dalam Persyaratan dan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu yakni berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai Partai Politik, memiliki kepengurusan paling sedikit 75% jumlah kabupaten/kota di Provinsi, memiliki kepengurusan paling sedikit 50%

jumlah kecamatan di kabupaten/kota, menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, memiliki kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan pemilu. Dari beberapa partai politik baru yang ikut serta dalam pemilu serentak 2019 adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2018 mengenai persyaratan dalam pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, PSI sebagai partai Politik baru sudah memenuhi syarat. Dari berbagai partai politik baru di peserta pemilu tahun 2019 sebagai perbandingan untuk partai politik baru di wilayah Yogyakarta hasil verifikasi persyaratan antara Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Beringin Karya, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persentase Kepengurusan

No	Partai Politik	Persentase Keterwakilan Perempuan	Persentase sebaran pengurus min. 75% di	Jumlah Anggota Partai

			Kab/Kota D.I. Yogyakarta	
1	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	66.66 %	80.00 %	5.076
2	Partai Beringin Karya (BERKARYA)	33.33 %	100.00 %	8.497

Sumber: <https://www.kpu.go.id/>

Adapaun data pendukung sebagai perbandingan, berikut data Calon Legislatif DPRD D.I Yogyakarta dari kedua Partai di atas:

Tabel 1.2 Data Caleg PSI

NAMA	DAERAH PEMILIHAN
Marta Endah Lestari Nur Sigit Nugroho, S.E Andreas Andi Bayu Hermawan Riska Karmida, S.Sos, M.A Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom, MM. Sanddy Bhudi Agung Nugroho, SE	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1
Maryati Guntur Saroso	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2
-	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 3
-	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 4
Suryatiningsih Budi Lestari, S.H Ir. Welly Chan, M.Div R. Kuncoro Wahyu Nugroho, S.E.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 5
Sylvi Dewajani, S.psi., Psi., M.Sc Irving Rua Berlin Dani Eko Wiyono, S.T, M.T	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 6
Erlin Susanti, A.Ma, Pd.sd Antonius Pinta Jalu Sunaryo	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 7

Sumber: <https://www.kpu.go.id/>

Tabel 1.3 Data Caleg BERKARYA

NAMA	DAERAH PEMILIHAN
Maryono, S.Sos Triyaningsih, S,IP, M.SI HJ. Aida Ratu Paksi, S.E Ali Imron, S.Ag Dicky Hida Syachari, S.T, M.M, P.h.D	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1
Poppy Purbana Sari, S.T RM. Suryo Radietama NK, S.H Rahayu Widyaningsih Danang Palar Wijaya Nur Aris Setyawati Ahmad Slmaet Antofriyadi	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2
Herli LuKMAN Hariri, S.Pd.i Sahid Supriyanto, S.H Siti Jannatun Maysaroh Rita Bian Kuswanti Ahmad Furkon Wiko Waseso, S.E	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 3
Raden Ajeng Mandaya Retno Dwi Hapsari Arum Kusuma Wardhani, S.T Samiri Rita Kurniawati, S.E Noor Jeehan Yasmin Agus Nurohman, S.Pd.i	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 4
R. Baker Berger Ombara, S.H Drs. Sutrisno, M.A Dyah Permata Kusumadjati, A.Md Astrid Dianka Pratiwi, S.T.P Ir. Akhmad Dawam Drs. Mujiyono, M.M Wanti Yuli Lestari Supriyono Putro, B.Sc	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 5
Endar Budi Setyono, S.T, M.M Endang Rumadiningsih Hasanudin, S.Ag	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 6
Edi Purwanta, S.E Puji Lestari Fauzan Rahman Agus Widodo Suprapti Eka Candra	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 7

Sumber: <https://www.kpu.go.id/>

Kedua partai politik baru dengan platform yang berbeda Partai Solidaritas Indonesia mempunyai platform “PSI Partainya anak muda” sedangkan berkarya dengan platform “Trilogi Pembangunan”. Setelah melihat perbandingan kedua partai politik baru di atas berdasarkan persentase kepengurusan kedua partai politik tersebut cukup baik dan keduanya apabila dibandingkan mempunyai kelebihan dan kekurangan dibidangnya masing-masing. Namun berdasarkan hasil pemilu Partai Solidaritas Indonesia meloloskan satu caleg untuk duduk di kursi DPRD D.I Yogyakarta:

Tabel 1.4 Data Caleg PSI terpilih

Nama	Daerah pemilihan	Perolehan suara
Dr. Stevanus Christian Handoko, S.Kom, MM.	Daerah Istimewa Yogyakarta 1	2.458

Melihat perbandingan dari kedua partai politik baru di atas maka penulis mengambil kesimpulan Partai Solidaritas Indonesia sebagai objek penelitian.

Partai Solidaritas Indonesia atau disingkat PSI, didirikan di Jakarta pada tanggal 16 November 2014. Sebuah partai politik baru dalam kontestasi pesta demokrasi tahun 2019, sebagai partai politik baru bukan berarti PSI tidak memiliki tempat khususnya di wilayah Yogyakarta dan PSI bisa saja bersaing dengan jumlah anggota sebanyak 5.076 orang anggota.

Setiap partai politik yang ikut dalam kontestasi tersebut tentunya memiliki ideologi serta visi misi yang berbeda. Partai Politik peserta pemilu sudah mempunyai basis wilayah masing – masing dan juga mempunyai

strategi politik tersendiri untuk menarik simpati masyarakat. Adanya penambahan partai politik yang telah dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti pemilu 2019, artinya basis-basis wilayah yang sebelumnya sudah menjadi basis partai politik peserta pemilu 2014 akan terusik.

Tidak main-main Partai Solidaritas Indonesia dalam mengikuti kontestasi politik pada pemilu 2019 ini, mengucurkan dana yang begitu besar. Dikutip dari laman resmi KPU, dana kampanye mencapai 84 miliar dengan rincian penerimaan Rp. 84.660.186.785 pengeluaran Rp. 84.657.844.428 dan saldo per 25 April 2019 Rp.2.342.356. (kpu.go.id).

Tidak kalah penting nya untuk dibahas dalam pemilu 2019 ini mengenai Partai Politik baru yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sebuah partai politik yang menaungi anak muda. Hal yang tidak kalah menarik dari partai politik baru ini yaitu bagaimana strategi komunikasi dalam menjual suara partai atau marketing politik. PSI yang merupakan sebuah partai politik dengan notabane anak-anak muda, idealisme partai ini masih sangat kuat. PSI yang mayoritas di isi oleh anak – anak muda dengan idealis yang masih sangat besar seharusnya tidak masuk ke koalisi petahan melainkan ke oposisi atau bahkan di luar koalisi. Tetapi pada kenyataannya lebih memilih masuk ke koalisi petahana, dengan bergabungnya PSI tersebut adalah sebuah strategi politik sebuah partai.

Di dalam dunia politik banyak sekali persepsi baik simbol, warna, dengan segala macam makna. PSI yang notabane adalah anak-anak muda

sebuah partai politik yang bisa dikatakan terlihat nyentrik, bagaimana tidak dari pakaian saja PSI sudah tampil beda dengan partai-partai politik lainnya. Pakaian atau seragam yang digunakan PSI yaitu jaket berwarna merah yang mana sangat berbeda sekali dengan apa yang di pakai oleh partai politik lainnya, hal ini bisa saja menjadi sebuah strategi politik atau bahkan gaya politik yang dibawa oleh PSI itu sendiri sebagai partainya anak muda. Pada pemilihan presiden 2014 lalu misalnya, Jokowi mengenakan baju putih lengan panjang dengan setengah digulung tanpa dimasukkan ke dalam celana, berhasil menjadikan pakaian tersebut untuk membangun citra. Dalam hal ini PSI yang mengenakan seragam partai yaitu jaket berwarna merah, bisa jadi upaya untuk membangun citra partai yang menyesuaikan gaya fashion kaum milenial saat ini serta bisa juga dikatakan sebagai strategi politik.

Ketika dikaji lebih mendalam bergabungnya sebuah partai politik baru masuk dalam suatu koalisi, perlu di siasat apakah hanya ingin menaikan elektabilitas partai atau mempunyai ambisi lain. Adapun alasan bergabungnya PSI ke kubu petahana, Jokowi dinilai memiliki pengalaman dalam memimpin sipil sedangkan Prabowo tidak. Hal itu yang menjadi salah satu alasan kuat PSI mantap mendukung Jokowi. "Bagi kami, pak Prabowo tidak punya pengalaman dalam dunia pemerintahan sipil," kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany saat berkunjung ke Redaksi Tribunnews.com, Selasa (27/3/2018).

Bergabungnya PSI dalam koalisi Petahan di pemilu 2019 ini menimbulkan beragam asumsi dari masyarakat. Meskipun demikian, PSI tetap dengan sikap perjuangannya yaitu melawan intoleransi. Pada saat acara festival 11 Yogyakarta pidato politik yang disampaikan Grace selaku Ketua Umum PSI berjudul ‘Musuh Utama Persatuan Indonesia’ Grace menyortir kota Yogyakarta sudah mulai terancam kaum Intoleran, “pertengahan Desember lalu, sebuah nisan kayu salib dipotong di Kotagede, Yogyakarta, dan prosesi doa kematian gagal dilakukan karena mendapat penolakan massa,” kata Grace Natalie. *Tribun news*. (2019 februari 12)

Berbagai macam pro kontra PSI di kalangan masyarakat maupun lawan politik (parpol), PSI tetap kokoh dengan visi dan misinya serta tetap dengan gaya komunikasi yang nyentrik menarik untuk dibahas. Hal menarik yang dilakukan oleh PSI khususnya DPW PSI Yogyakarta sebagai partai politik baru dalam mendapatkan calon wakil rakyat yang berkualitas mereka melakukan Fit and Propertest, seleksi yang diikuti 57 peserta bacaleg legislatif provinsi maupun kabupaten/kota. apa yang dilakukan PSI ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan partai politik baru lainnya di wilayah Yogyakarta. Ketua DPW PSI DIY Sigit Nugroho mengemukakan hal paling menarik dalam seleksi tahap kedua ini ternyata 75% peserta adalah orang muda, berusia di bawah 40 tahun. “Mereka berpendidikan S-1 rata-rata, dan semua rata-rata sudah bekerja mapan,” jelas Sigit kepada wartawan, *Krjogja.com Minggu (15/4/2018)*.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **Komunikasi Politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada pemilih pada pemilu 2019 (studi kasus DPW Partai Solidaritas Indonesia Yogyakarta).**

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Komunikasi Politik yang dilakukan DPW Partai Solidaritas Indonesia pada pemilu 2019 di Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan di atas penulis menentukan haluan dari penelitian ini, sebagai berikut:

Untuk mengetahui strategi komunikasi DPW Partai Solidaritas Indonesia pada pemilu 2019 di Yogyakarta?

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari sebuah penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau dijadikan sebagai referensi studi Ilmu Pemerintahan khususnya penelitian Komunikasi Politik.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi PSI sebagai acuan agar dapat melihat seberapa efektif komunikasi yang selama ini telah dibangun dalam pemilihan umum 2019 sebagai partai politik pendatang baru.
- b. Bagi masyarakat, Bagi Masyarakat, agar lebih mengetahui seberapa jauh gerak langkah nyata PSI terutama dalam menjalankan komunikasi politik di masyarakat luas.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 1.5 Tinjauan pustaka

No	Judul	Penulis dan Tahun	Temuan Penelitian
1	Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam keterbukaan Ideologi	Erfina Nurussa'adah, Suwandi Sumartias (2017)	Hasil penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi Komuniku politik dalam keterbukaan ideologi DPW PKS Jawa Barat dengan tujuan untuk mengetahui komunikasi politik dalam keterbukaan ideologinya.
2	Strategi Komunikasi "Politik tanpa mahar" Kaderisasi Partai Nasional Demokrat wilayah Riau	Chelsy Yesica (2018)	Hasil dari penelitian ini ununtuk mengetahui proses rekrutmen politik Partai Nasional Demokrat Wilayah Riau dalam menentukan kadernya sehingga siap menghadapi pemilu legislatif 2019.
3	Strategi Komunikasi Politik dan	Atie Rachmiatie, O.Hasbiansyah, Ema	Hasil dari penelitian ini lebih menelaah budaya politik, strategi komunikasi politik

	Budaya Transaparansi partai politik	Khotimah, Dadi Ahmadi (2013)	dan keterbukaan informasi publik di lingkungan partai politik.
4	Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah pada Pemilu 2014	Hard Y. Pattisina (2015).	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan yaitu dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara menyampaikan segala bentuk program kerja kepada masyarakat melalui berbagai alat komunikasi seperti media masa bahkan terjun langsung.
5	Strategi Partai Politik dalam menghadapi Pemilu 2014	Debora Sanur Lindawati (2013)	Hasil dari penelitian ini, partai perlu mengorganisir kegiatan kampanye secara kolektif. Partai juga harus menyusun pedoman etika berikut penegakannya berupa sanksi, jika kompetisi internal para caleg tidak sehat dan merusak.
6	Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai	Khorudin Muchtar (2016)	Hasil dari sebuah penelitian ini untuk memperoleh suatu gambaran bagaimana Partai Golkar mempertahankan eksistensi dan Citra Partai, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.
7	Strategi Komunikasi Politik pasangan Bambang-Icek dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten	Narendara, Rosa Arista (2013)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana strategi komunikasi politik yang mereka gunakan untuk memperoleh kemenangan pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten Grobogan tahun 2011, yaitu dengan cara Merawat ketokohan, Pemantapan Kelembagaan, Memahami Khalayak, dan menyusun pesan persuasif.

	Grobogan Tahun 2011		
8	Strategi Pemenangan Partai Hanura di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014	Puja Dias Chandra Octanto, Ubaidullah (2018)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana komunikasi politik, rekrutmen yang profesional, kampanye gerakan beramal tanpa atribut dan sebagainya.
9	Strategi Komunikasi Politik dan Pemenangan pasangan Muhammad Ramadhan Pomanto-Syamsu Rizal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013	Qalbi, Nurul (2013)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan strategi komunikasi politik dalam meraih simpatik masyarakat kota masyarakat, memaksimalkan kesolidan dan kekompakan partai pengusung mampu bekerja sampai ke akar rumput sehingga setiap tim kampanye bekerja tetap melakukan instruksi satu komando.
10	Strategi Marketing Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam menghadapi Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Provinsi Aceh)	Mutiara Rahma, Maimun (2018)	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Perindo melakukan kampanye politik melalui media pengiklanan yang merupakan program dari DPP, sedangkan Partai Perindo DPW Aceh dalam penerapan konsep marketing politik melakukan sosialisasi.

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dikemukakan partai politik lainnya. Adapun penelitian ini berfokus pada pola-pola komunikasi politik yang dilakukan dalam pemilu 2019.

F. KERANGKA DASAR TEORI

Untuk memberikan pemahaman yang komperenshif, maka penting kiranya bagi peneliti mempunyai beberapa landasan teori pada penelitian ini. Adapun beberapa teori yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu), Partai Politik (Parpol), Komunikasi Politik.

1. Pemilihan Umum

Indonesia adalah suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu sistem demokrasi elektoral. Pemilihan Umum menjadi salah satu ajang partai politik merebut kekuasaan maupun mempertahankan dalam kontestasi politik. Dalam hal ini yang akan melatar belakangi bagaimana Komunikasi politik dianggap sangatlah penting dalam mendapatkan suara dari rakyat untuk mendapatkan kekuasaan dari rakyat itu sendiri.

Pemilu adalah kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945. (UU NO 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu).

Dalam Ilmu politik dikenal berbagai macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya tetap berpegang pada dua prinsip pokok, yaitu:

- a. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem Distrik).
- b. Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional). (Budiardjo, 2008, hal. 461-462).

Menurut Beny dalam Haris (2016). Pemilihan Umum serentak adalah sebuah sistem pemilihan yang dilakukan secara serentak di setiap daerah ataupun dalam beberapa pemilihan pada kurun waktu bersamaan. Adapun jenis dalam pemilihan tersebut meliputi pemilihan eksekutif dan legislatif. Dalam penggunaan sistem pemilu serentak, praktik umum banyak diterapkan adalah menggabungkan pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif.

2. Partai Politik

Partai Politik berbeda dengan kelompok kepentingan dan penekan. Ciri paling mendasar yang membedakan partai dengan

organisasi lainnya adalah orientasi pada kekuasaan dan penggunaan mekanisme pemilu sebagai cara mencapai kekuasaan. Partai politik dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu “sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum” (Pamungkas. 2012, hal. 4).

Partai Politik secara umum adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. (Budiardjo, 2008, hal. 404)

Selain itu ada beberapa pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli. Definisi tentang partai politik tersebut antara lain sebagai berikut :

Carl J. Friedrich (1967) dalam (Budiardjo, 2008) : “Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil” (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of giving to members of*

the party, through such a control ideal and material benefits and advantages).

Sigmund Neumann (1963) dalam (Budiardjo, 2008) : “Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda” (*A Political party is the articulate organization of society’s active political agent; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular support with other groups holding divergent views).*

Giovanni Sartori dalam (Budiardjo, 2008) : “Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (*A party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office).*

Giovanni Sartori dalam (Budiardjo, 2008) : “Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (*A party is any political*

group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office).

Dari uraian diatas mengenai definisi partai politik, dapat dikatakan partai politik adalah sebuah organisasi politik yang dibentuk atas dasar ideologi yang sama dengan tujuan yang sama untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam pemerintahan baik Eksekutif maupun Legislatif. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan mencari dukungan rakyat yang akan memberikan suara melalui sebuah mekanisme pemilu yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

3. Komunikasi Politik

Komunikasi secara sederhana, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui atau tanpa media yang menimbulkan akibat tertentu. Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah sebuah aktivitas pertukaran ide atau gagasan secara sederhana. Dengan demikian, komunikasi dapat dipahami sebagai kegiatan penyampaian ide atau pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan menghasilkan kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disampaikan (Mukarom. 2016).

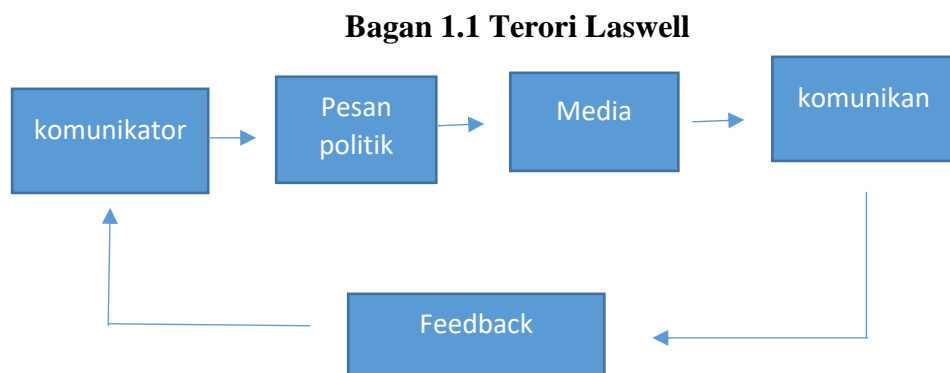
Miriam Budiardjo dalam (Mukarom, 2016) komunikasi ialah sebagai salah satu fungsi partai politik, yaitu menyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa untuk diperjuangkan menjadi kebijakn publik.

Lebih lanjut Maswadi Rauf (Mukarom, 2016) di dalam komunikasi politik dibagi dua dimensi, yaitu:

- a. Kegiatan politik, sebuah penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain.
- b. Kegiatan ilmiah, kegiatan politik dalam sistem politik.

M.Perloff (1998) dalam Mukarom, 2016) mengemukakan bahwa Komunikasi politik sebagai peroses pemimpin, media dan warga negara suatu bangsa bertukar dan menyerap makna pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Dalam definisi ini, Perloff menjadikan media sebagai pihak yang ikut melakukan komunikasi politik.

Adapun indikator dari sebuah komunikasi politik berdasarkan teori Lasswell, yaitu sebagai berikut:



Skema kerja proses komunikasi politik

- a. Komunikator

Komunikator politik pada dasarnya semua orang yang berkomunikasi tentang politik, mulai dari obrolan warung kopi

hingga sidang parlemen untuk membahas konstitusi negara. Akan tetapi yang menjadi komunikator utama adalah para pemimpin partai atau pejabat pemerintah karena mereka yang akan menciptakan pesan politik untuk kepentingan politiknya.

b. Pesan Politik

Pesan politik adalah informasi, fakta, opini dan keyakinan politik. Dalam hal ini merupakan produk penguasa atau lembaga kekuasaan setelah melalui proses encoding (proses penyusunan ide menjadi simbol atau pesan) atau setelah setelah diformulasikan ke dalam simbol-simbol yang sesuai dengan kapasitas sasaran.

c. Media

Media merupakan wadah (medium) yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi sebagai alat transformasi pesan-pesan kepada masyarakat.

d. Komunikan

Komunikan merupakan partisipan yang diberikan informasi politik oleh komunikator. Komunikan adalah yang tergolong dalam infrasstruktur atau suprastruktur politik.

e. Feedback

Feedback adalah tanggapan dari komunikasi atas informasi politik yang diberikan oleh komunikator.

4. Strategi Komunikasi Politik

Strategi adalah sebuah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental yaitu sifat yang senantiasa meningkat dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang terjadi dan bukan mulai dari apa yang terjadi (Ardianto. 2008:17).

Pada dasarnya strategi adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai sebuah tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang akan menunjukkan arah usaha, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendy. 1990:32).

Strategi komunikasi politik merupakan tentang bagaimana proses komunikasi yang terjadi di dalam pemenangan dalam sebuah pertarungan politik oleh partai politik, atau secara langsung, oleh seorang calon legislatif atau calon pimpinan daerah, yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya di tengah-tengah masyarakat sebagai konstituennya (Zein. 2008:17). Kemudian, definisi dari Zein (2008:109) menurutnya, bahwa strategi Komunikasi Politik adalah rencana yang meliputi metode, teknik dan tata hubungan fungsional

antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi guna kegiatan operasional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi guna kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi komunikasi politik merupakan tentang bagaimana proses komunikasi yang terjadi di dalam pemenangan dalam satu pertarungan politik oleh partai politik, atau secara langsung, oleh seseorang calon legislatif atau calon pemimpin daerah, yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya di tengah-tengah masyarakat sebagai konstituennya (Abdullah. 2008). Kemudian definisi dari Abdullah menurutnya, strategi komunikasi politik adalah rencana yang meliputi metode, teknik dan tata hubungan fungsional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi guna kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa partai politik membutuhkan sebuah perencanaan strategi dalam melakukan interaksi dengan masyarakat untuk upaya menarik simpatisan dan dukungan dari masyarakat. Dalam strategi komunikasi politik ini menyangkut produk politik yang akan dibawakan, pesan politik yang akan disampaikan, dan image yang akan dimunculkan.

G. DEFINISI KONSEPSIONAL

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan wujud dari penyelenggaraan hak dipilih dan memilih sebagai warga negara dalam kontestasi demokrasi sehingga menciptakan pemimpin yang dikendaki rakyat, yang dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok orang-orang yang tergabung dalam sebuah organisasi dengan cita-cita dan tujuan yang sama, yakni salah satunya adalah menempatkan wakil-wakilnya di pemerintahan baik Eksekutif maupun Legislatif.

3. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah suatu proses penyampaian pesan politik serta mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyalurkan beragam aspirasi yang diatur sedemikian rupa agar diperjuangkan oleh wakil-wakil dari partai politik.

4. Strategi Komunikasi Politik

Strategi Komunikasi Politik adalah sebuah perencanaan proses komunikasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dalam sebuah pertarungan politik untuk merebut kekuasaan baik di legislatif maupun eksekutif.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan unsur dari penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur variabel atau pedoman untuk melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Untuk mengetahui Pola Komunikasi Politik DPW PSI sebagai partai politik pendatang baru di pemilu serentak 2019, Sehingga definisi operasional dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Komunikator, memberi informasi atau pernyataan tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik dari DPW PSI Yogyakarta kepada publik dalam Pemilu 2019.
 - a. Aktor yang bertindak menyampaikan pesan.
 - b. Hal yang dilakukan dalam menyampaikan pesan.
- b. Pesan politik, penyampaian pesan yang disampaikan, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan mengandung unsur politik
 - a. Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
 - b. Isu dalam kampanye
- c. Media, alat atau Sarana yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politik.
 - a. Media elektronik.
 - b. Media online.
 - c. Media cetak.

- d. Komunikasikan, merupakan sasaran atau target politik yang diharapkan dapat memberikan dukungan yang mana nantinya bermuara pada perolehan suara dalam pemilihan umum 2019.
 - a. Aktor komunikasi
 - b. Sasaran target politik
- e. Feedback, menumbuhkan pengaruh atas pemahaman yang telah disampaikan oleh komunikator.
 - a. Berpengaruh terhadap elektabilitas partai.
 - b. Berpengaruh terhadap suara calon legislatif dari partai PSI.

I. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bersifat deskriptif serta bekerja dalam setting yang alamiah, dan berupaya memahami pokok permasalahan dengan analisis dan tafsiran pada fenomena yang dilihat. Ada beberapa indikator dalam teknik pengambilan data yang digunakan pada penelitian kualitatif yaitu seperti wawancara, observasi, dan instrumentasi (Salim, 2006).

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya)

yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian (Rahmawati, Dian Eka. 2011). Dalam penggunaan metode penelitian ini, peneliti mencoba melihat dan memahami tentang bagaimana komunikasi politik partai solidaritas indonesia sebagai partai politik pendatang baru di pemilu 2019 dengan indikator pada definisi operasional yang merupakan bentuk reduksi dari kerangka teori.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun narasumber dalam sebuah penelitian ini, yaitu Ketua DPW PSI Yogyakarta dan pengurus.

3. Unit Analisa Data

Berdasarkan pokok permasalahan yang terdapat pada inti dalam penelitian ini, penulis mencoba menyusun unit analisa yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Adapun unit analisa dalam penelitian ini yaitu DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Jenis data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber data dengan tujuan tertentu dengan wawancara yang

didapatkan dari narasumber atau informan. Data primer dalam penelitian ini mengacu dari hasil wawancara dengan Ketua dan pengurus DPW PSI Yogyakarta.

Tabel 1.6
Data Primer Penelitian

Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Informasi tentang strategi Komunikasi Politik Partai Solidaritas Indonesia	Ketua DPW PSI Yogyakarta	Wawancara
Informasi tentang media-media yang digunakan dalam komunikasi politik Partai Solidaritas Indonesia	Humas/media/pengurus DPW PSI Yogyakarta	Wawancara

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat lebih obyektif, data yang didapatkan dalam hal ini yaitu berdasarkan jurnal, buku, skripsi, tesis dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni terkait Komunikasi Politik yang dilakukan oleh DPW PSI Yogyakarta.

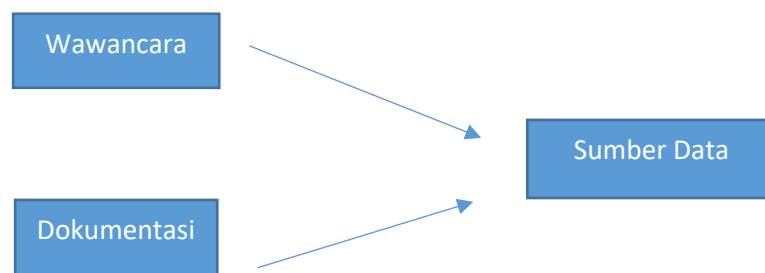
Tabel 1.7 Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data
Profil DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi D.I Yogyakarta	Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Yogyakarta
Dokumen yang menjadi landasan Partai Solidaritas Indonesia	Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi D.I Yogyakarta
Buku, Jurnal, Artikel terkait Strategi Komunikasi Politik	Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi D.I Yogyakarta

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumen. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

Bagan 1.2 Teknik Pengumpulan Data



a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini terkait pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber atau informan terkait. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Ketua dan pengurus yang terkait di DPW PSI

Yogyakarta untuk mendapatkan informasi tentang Komunikasi Politik dalam pemilu 2019.

Tabel 1.8 Daftar Narasumber Penelitian

No.	Narasumber	Jumlah
1.	Ketua DPW PSI Provinsi D.I Yogyakarta	1
2.	Pengurus DPW PSI Provinsi Yogyakarta	1

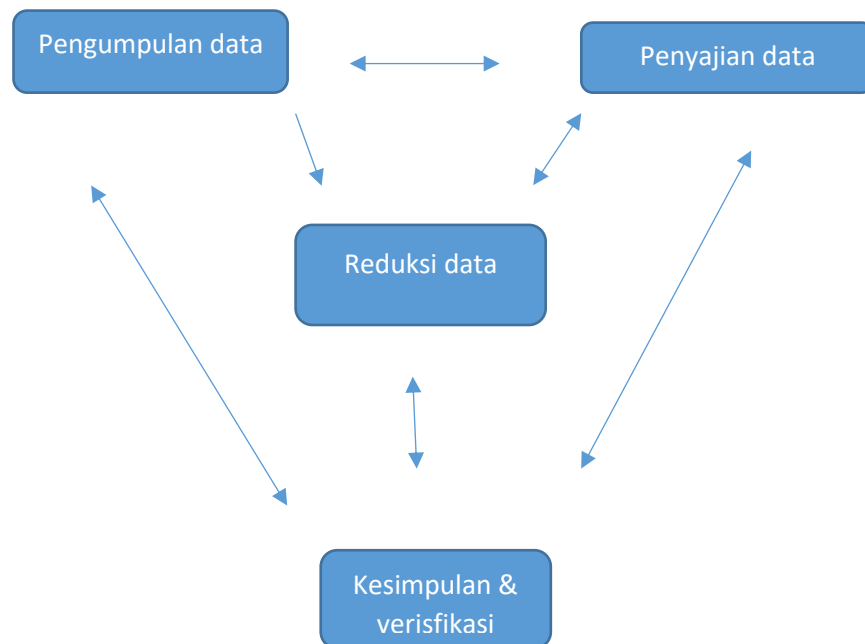
b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015 : 329). Dokumen adalah sebuah tulisan ataupun catatan penting yang memuat informasi. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, dan gambar dari seseorang. Dengan menggunakan teknik dokumen peneliti bisa memperdalam dan melengkapi penelitian ini.

6. Teknik Analisa Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2015 : 337-345) dalam menganalisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan pada proses penelitian berlangsung setelah dengan jangka waktu tertentu. Terdapat empat tahapan dalam penyajian analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Bagan 1.3 Teknik Analisis Data



Sumber: sugiyono (2015)

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses untuk memilah data. Dimanapeneliti dituntut melakukan analisis data, mana yang masuk dalam penelitian mana yang tidak masuk penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dengan kata lain adalah menyambungkan data informasi agar mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan interpretasi data yang melibatkan peneliti untuk menyalurkan data atau mendisplay data. Dengan cara membandingkan dan membuat pola.